

ABSTRAK

Nama : Alia Nabila
Judul Skripsi : Komparasi Penjatuhan Tindakan Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel)
Halaman : vii + 102 halaman, 10 lampiran
Kata kunci : Komparasi, Penjatuhan Tindakan Rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika

Isi:

Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang dapat menimbulkan perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan oleh sekelompok masyarakat sehingga dibutuhkan aturan hukum dan upaya penyembuhan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melahirkan suatu upaya untuk menyembuhkan pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi adalah suatu pemulihan agar seseorang dapat kembali kepada keadaan terdahulu. Namun, tidak semua perkara penyalahgunaan narkotika dapat diupayakan rehabilitasi. Dalam kasus pelaku penyalahgunaan narkotika, ada yang diupayakan rehabilitas seperti yang dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 191/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. Namun dalam dua kasus serupa yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 375/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, penyalahgunaan narkotika tidak diupayakan rehabilitasi dan bahkan dipidana. Bagaimana persamaan penjatuhan sanksi dalam Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel., Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel., Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel dan Bagaimana perbedaan penjatuhan sanksi dalam kasus Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel., Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel., Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel? Penulis menggunakan metode hukum normatif dan menggunakan data wawancara sebagai data penunjang. Hasil penelitian mengungkap bahwa perbedaan penetapan terjadi karena adanya inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rehabilitasi, adanya kebebasan hakim untuk memutus suatu perkara, dan adanya perbedaan penafsiran dalam menerapkan peraturan hukum yang berlaku.

Acuan : 22 Buku (1968-2014)

Pembimbing : Dr. Hj. Mety Rahmawati, S.H., M.H.

Penulis

Alia Nabila